

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN INDRAMAYU

Dwi Meilisa Fitria¹, Ipik Permana², Arief Prayitno³

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

dwimeilisa55@gmail.com¹, ipik.permana@ugj.co.id², ariefprayitno8668@gmail.com³

Abstrak

Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten menjadi hambatan. Banyak pegawai yang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mendukung reformasi birokrasi yang berbasis teknologi informasi dan manajemen modern. Budaya kerja yang cenderung statis dan kurang inovatif seringkali menghambat penerapan perubahan. Resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi merupakan masalah utama yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi reformasi birokrasi yang diterapkan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, dengan menggunakan teori reformasi birokrasi dari Sedarmayanti sebagai dasar analisis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun semua dimensi reformasi birokrasi telah diterapkan, implementasinya belum optimal. Dimensi pertama, pembaharuan mind set dan culture set, telah dilaksanakan melalui pemberian tunjangan kinerja dan kegiatan evaluasi serta sharing knowledge, namun hasilnya kurang maksimal karena penilaian kinerja dianggap tidak objektif dan kurangnya antusiasme pegawai. Dimensi kedua, internalisasi prinsip tata pemerintahan yang baik, terlaksana melalui partisipasi dalam webinar, namun masih kurang efektif karena kurangnya pelaksanaan mandiri di BPS Kabupaten Indramayu. Dimensi sistem manajemen pemerintahan di BPS Kabupaten Indramayu lebih bersifat pelaksanaan kebijakan, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BPS pusat. Dalam strategi penataan sumber daya manusia, terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perencanaan kebutuhan SDM yang tepat, pelatihan, penerapan sistem kinerja transparan, penguatan budaya organisasi, rotasi dan mutasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, tantangan terbesar tetap pada optimalisasi pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan, BPS Kabupaten Indramayu masih perlu memperbaiki pelaksanaan reformasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik, Strategi

Abstract

The limited quality and competent human resources are an obstacle. Many employees do not yet have adequate skills to support bureaucratic reform based on information technology and modern management. A work culture that tends to be static and less innovative often hinders the implementation of change. Resistance to change from within the organization is the main problem faced. This study aims to analyze the bureaucratic reform strategy implemented at the Central Statistics Agency (BPS) of Indramayu Regency, using Sedarmayanti's bureaucratic reform theory as the basis for analysis. The method used is qualitative with a case study approach. The results of the study show that although all dimensions of bureaucratic reform have been implemented, the implementation has not been optimal. The first dimension, renewal of mind set and culture set, has been implemented through the provision of performance allowances and evaluation activities and knowledge sharing, but the results are less than optimal because performance assessments are

considered non-objective and there is a lack of employee enthusiasm. The second dimension, internalization of the principles of good governance, is implemented through participation in webinars, but is still less effective due to the lack of independent implementation at BPS Indramayu Regency. The dimensions of the government management system at BPS Indramayu Regency are more in the nature of policy implementation, following the rules set by the central BPS. In the human resource management strategy, there are efforts to improve the quality of human resources through proper human resource needs planning, training, implementation of transparent performance systems, strengthening organizational culture, rotation and mutation, and utilization of information technology. However, the biggest challenge remains in optimizing the implementation of the strategy. This study concludes that despite progress, BPS Indramayu Regency still needs to improve the implementation of reforms to achieve more optimal results.

Keywords: *Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik, Strategi*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks global, berbagai negara telah melaksanakan reformasi birokrasi sebagai bagian dari penguatan institusi publik untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Isu global terkait dengan efisiensi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik semakin mendesak, terutama dalam era digitalisasi dan globalisasi yang membawa tantangan baru bagi sektor publik. Salah satu lembaga pemerintah yang turut terlibat dalam reformasi birokrasi adalah Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di tingkat kabupaten, seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Di BPS, reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah, serta mendukung upaya pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Isu spesifik dalam reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja organisasi serta pelayanan publik di bidang statistik. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 205 Tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023) menunjukkan adanya arah kebijakan baru yang berfokus pada transformasi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga tersebut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Indramayu, yaitu keterbatasan dalam sumber daya, infrastruktur yang belum memadai, serta kebutuhan untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data statistik yang relevan bagi masyarakat.

Urgensi reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu sangat tinggi, terutama dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berbasis data. Dengan adanya reformasi birokrasi yang tepat, BPS diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kualitas data statistik, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Selain itu, dalam konteks pemerintah daerah, reformasi birokrasi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang statistik, BPS Kabupaten Indramayu memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Tinjauan pustaka mengenai reformasi birokrasi di Indonesia telah banyak dibahas oleh berbagai ahli. (Budiman, 2019) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dwiyanto (2011) menekankan pentingnya peran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana reformasi birokrasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam hal ini, (Keban, 2008) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada perubahan dalam budaya organisasi yang dapat memperkuat pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana strategi reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu juga mengarah pada pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Muslim.A., (2020) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, karena sumber daya manusia yang kompeten dan profesional akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data statistik, sehingga BPS Kabupaten Indramayu perlu mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik yang lebih modern dan efisien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi reformasi birokrasi yang diterapkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, dengan fokus pada aspek-aspek manajerial, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh BPS Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mengacu pada pandangan Winarno, (2013) mengenai kebijakan publik, penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan reformasi birokrasi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang berbasis data di tingkat daerah, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang implementasi kebijakan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu dengan merujuk pada kerangka teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti (Prasojo, 2008), (Sedarmayanti, 2009), dan (Sinambela, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perubahan yang terjadi di BPS Kabupaten Indramayu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi reformasi birokrasi di lembaga tersebut.

Reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas data statistik yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang strategi reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena reformasi birokrasi yang diterapkan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dalam konteks reformasi birokrasi yang tidak hanya dapat dipahami dari data numerik, tetapi juga dari interaksi sosial, persepsi, dan pengalaman individu yang terlibat (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika yang terjadi dalam implementasi reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan para pegawai BPS Kabupaten Indramayu, mulai dari level pimpinan hingga staf pelaksana. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengalaman mereka terkait implementasi reformasi birokrasi, tantangan yang dihadapi, serta persepsi mereka terhadap perubahan yang dilakukan. Wawancara juga dilakukan dengan pihak terkait lainnya, seperti pihak dari BPS Provinsi dan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan layanan BPS. Proses wawancara ini mengikuti pedoman yang disusun sebelumnya, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi tambahan yang relevan.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sehari-hari di BPS Kabupaten Indramayu. Observasi ini bertujuan untuk memantau implementasi kebijakan reformasi birokrasi secara nyata, seperti pelaksanaan rapat evaluasi, penggunaan teknologi informasi dalam operasional, serta perubahan budaya kerja. Observasi dilakukan dalam periode yang cukup panjang untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi yang terkait dengan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu, seperti laporan tahunan, kebijakan internal, dan dokumen peraturan yang relevan. Dokumen ini memberikan informasi penting mengenai kebijakan yang diterapkan serta hasil evaluasi terhadap implementasi reformasi birokrasi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses analisis data terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul kemudian disaring dan diringkas untuk menemukan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Reduksi data juga dilakukan dengan mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau tidak mendukung analisis.

2. Penyajian Data

Data yang telah dianalisis dan direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan proses reformasi birokrasi yang terjadi di BPS Kabupaten Indramayu. Penyajian ini mencakup gambaran mengenai strategi yang diterapkan, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil yang telah dicapai.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Dengan teknik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Reformasi Birokrasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu telah menetapkan enam area perubahan dalam upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Enam area perubahan tersebut mengacu pada area perubahan yang telah dicanangkan

oleh BPS RI, dikurangi satu pilar yang merupakan wewenang BPS RI (Pilar Penguatan Undang-undang). Pada enam area perubahan tersebut juga telah dibentuk tim pada masing-masing area perubahan. Adapun enam area perubahan tersebut diantaranya: 1). Pilar Manajemen Perubahan (MP); 2). Pilar Tatalaksana; 3). Pilar Penataan Manajemen SDM; 4). Pilar Penguatan Pengawasan; 5). Pilar Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 6). Pilar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Strategi Reformasi Birokrasi (Sedarmayanti, 2009) yang telah dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu adalah:

1. Dimensi Pembaharuan *mind set* dan *culture set*

a. Peningkatan penghasilan dengan prinsip pekerjaan seimbang dengan imbalan

Pemberian peningkatan berupa tunjangan kinerja mampu meningkatkan kinerja pegawai. Namun dalam pelaksanaannya pemberian tunjangan kinerja juga harus berimbang dengan capaian kinerja, sehingga capaian kinerja harus dinilai secara objektif dan berdasarkan kinerja yang telah dicapai pegawai masing-masing. Dan penilaian bukan diberikan hanya sebagai pelengkap administrasi saja.

b. Pengembangan budaya kerja

BPS Kabupaten Indramayu telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung Reformasi Birokrasi, seperti mencanangkan Zona Integritas dan mempersiapkan diri sebagai satuan kerja WBK dan WBBM. Selain itu, BPS Kabupaten Indramayu juga rutin mengadakan rapat evaluasi mingguan dan kegiatan sharing knowledge bulanan. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dan mendukung tercapainya birokrasi yang profesional dan berintegritas.

c. Internalisasi dan Konkretisasi prinsip tata pemerintahan yang baik

BPS Kabupaten Indramayu telah menginternalisasi tata pemerintahan yang baik melalui partisipasi dalam webinar yang diselenggarakan BPS RI dan mengimplementasikannya secara nyata. Langkah-langkah tersebut diwujudkan melalui kepemimpinan yang efektif serta pelaksanaan evaluasi rutin dan menyeluruh, yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan kerja. Namun dalam implementasinya kurang maksimal karena kegiatan webinar dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang lain, serta partisipasi pegawai juga kurang.

2. Dimensi Sistem Manajemen Pemerintahan

a. Penciptaan pola dasar organisasi pemerintah

Penyederhanaan struktur organisasi di BPS Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020 berhasil mengurangi jumlah jabatan struktural dari tujuh menjadi dua, yakni satu kepala dan satu kepala sub bagian umum. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional pemerintahan. Meskipun struktur organisasi berubah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tetap dilaksanakan tanpa perubahan, dengan pegawai lainnya berperan sebagai statistisi.

b. Perubahan dari manajemen ketatausahaan ke manajemen sumber daya aparatur

BPS menyadari pentingnya peran sumber daya manusia sebagai aset utama untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga dilakukan pergeseran fokus dari ketatausahaan ke manajemen SDM yang lebih proaktif. Pergeseran ini melibatkan pengelolaan hubungan kerja, motivasi, pengembangan karier, serta pelaksanaan pelatihan dan seminar bagi pegawai. Namun, Kepala BPS Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan manajemen tersebut, karena sistem yang diterapkan masih sama seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan strategi antara level pusat dan daerah.

- c. Simplikasi dan otomatisasi tatalaksana sistem prosedur dan mekanisme pelayanan publik

Reformasi Birokrasi menuntut organisasi seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan pelayanan prima dengan inovasi yang relevan, adaptif terhadap perubahan, serta efisien dan efektif dalam operasional. BPS telah mengimplementasikan berbagai inovasi, terutama dalam hal e-government, seperti aplikasi presensi online, Simpeg online, aplikasi web entri, dan Kip-app untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai. BPS Kabupaten Indramayu juga mengadopsi inovasi-inovasi tersebut, yang membantu meningkatkan daya saing organisasi dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan bisnis.

- d. Perbaikan sistem pengelolaan asset/barang milik negara

Pengelolaan BMN yang baik di BPS Kabupaten Indramayu merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi. Dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, BPS diharapkan dapat memanfaatkan BMN secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan data statistik bagi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan BPS Kabupaten Indramayu dalam pengelolaan BMN menjadi contoh konkret bagaimana reformasi birokrasi dapat diterapkan di lingkungan lembaga pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

- e. Pembaharuan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik

BPS Kabupaten Indramayu telah mengadopsi sistem digital untuk mengelola proses keuangan, termasuk penggunaan aplikasi e-budgeting dan e-monitoring yang terintegrasi dengan platform pusat. Sistem ini memastikan transparansi dalam penganggaran dan pemantauan keuangan, memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, pembayaran terkait pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta honorarium kini dilakukan secara nontunai, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

- f. Pembaharuan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur

Pembaharuan sistem pengawasan dan akuntabilitas di BPS sangat penting untuk mendukung reformasi birokrasi yang efektif. BPS Kabupaten Indramayu mengadopsi langkah-langkah dari BPS RI untuk memperkuat pengawasan internal, seperti memperkuat Unit Pengawasan Intern (SPI), melakukan audit internal berbasis risiko, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, BPS juga mengimplementasikan teknologi informasi dalam pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIPI), yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara elektronik dan lebih transparan, memudahkan pimpinan dan unit kerja daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

3. Strategi Penataan Sumber Daya Manusia/Aparatur

Adapun strategi penataan sumber daya manusia dalam rangka Reformasi Birokrasi yang telah diterapkan di BPS Kabupaten Indramayu diantaranya adalah:

1. Pencanaan Kebutuhan SDM yang Tepat Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM
2. Peningkatan Kompetensi Melalui Pelatihan dan Pengembangan
3. Penerapan Sistem Kinerja yang Transparan dan Akuntabel
4. Penguatan Budaya Organisasi Reformasi Birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu
5. Rotasi dan Mutasi untuk Peningkatan Kapasitas
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan SDM

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Reformasi Birokrasi pada BPS**Kabupaten Indramayu****Faktor Pendukung**

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan. Pemimpin BPS Kabupaten Indramayu memiliki peran penting dalam mendorong perubahan budaya organisasi, menetapkan arah kebijakan, serta memastikan implementasi reformasi berjalan sesuai dengan rencana. Komitmen yang konsisten dari pimpinan akan memberikan motivasi bagi seluruh pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan dalam proses reformasi.

Reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada di BPS Kabupaten Indramayu. Pengembangan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme, menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa SDM BPS Kabupaten Indramayu mampu memenuhi tuntutan reformasi. Peningkatan kapasitas ini mencakup kemampuan teknis dalam pengolahan data, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan manajerial untuk mengelola perubahan di lingkungan kerja.

Teknologi informasi merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung reformasi birokrasi, termasuk di BPS Kabupaten Indramayu. Penggunaan sistem informasi yang canggih dan terintegrasi membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengumpulan data, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. BPS Kabupaten Indramayu telah mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas statistik dan pengelolaan data, seperti Sistem Informasi Statistik Terpadu (SIST), yang memfasilitasi akses data statistik secara cepat dan akurat, pengolahan data terintegrasi website, pendataan melalui android, sert pengelolaan keuangan yg semuanya menggunakan aplikasi.

Faktor lain yang berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu adalah perubahan budaya organisasi. Reformasi birokrasi tidak hanya melibatkan perubahan struktural dan prosedural, tetapi juga memerlukan perubahan dalam sikap dan perilaku pegawai. BPS Kabupaten Indramayu perlu membangun budaya kerja yang lebih terbuka, inovatif, dan responsif terhadap perubahan, serta mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Regulasi dan kebijakan yang jelas dan mendukung sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam konteks BPS Kabupaten Indramayu, adanya peraturan pemerintah dan peraturan internal yang mengatur prosedur kerja, kode etik, serta pedoman pelaksanaan tugas statistik merupakan faktor yang memperkuat proses reformasi. Regulasi yang memadai memberikan landasan hukum yang kuat bagi BPS Kabupaten Indramayu dalam mengimplementasikan reformasi secara efektif dan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari kalangan internal maupun eksternal. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat proses reformasi, karena dapat menyediakan berbagai perspektif, masukan, serta dukungan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. BPS Kabupaten Indramayu secara rutin melakukan dialog dan komunikasi dengan

stakeholder untuk memastikan bahwa proses reformasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung yang telah disebutkan. Dengan adanya komitmen pimpinan, kualitas SDM yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, perubahan budaya organisasi, regulasi yang jelas, serta partisipasi dari stakeholder, BPS Kabupaten Indramayu dapat mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Faktor Penghambat

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu adalah resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai. Banyak pegawai yang merasa nyaman dengan cara kerja lama sehingga menolak untuk beradaptasi dengan prosedur baru. Ketidakpastian akan perubahan, ketakutan kehilangan posisi, atau beban kerja tambahan seringkali menjadi penyebab resistensi ini. Hal ini membuat proses reformasi menjadi lambat karena membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja yang sudah ada.

Reformasi birokrasi sering kali membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan pegawai, serta investasi teknologi. Namun, keterbatasan anggaran di BPS Kabupaten Indramayu sering menjadi kendala dalam menjalankan program reformasi dengan optimal. Dana yang terbatas membuat beberapa inisiatif strategis terpaksa ditunda atau dijalankan dengan skala yang lebih kecil, sehingga tidak dapat memberikan dampak signifikan yang diharapkan.

Meskipun BPS Kabupaten Indramayu memiliki banyak pegawai yang berkualitas, tantangan utama dalam reformasi birokrasi adalah belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketidakmerataan ini muncul dari berbagai factor, termasuk perbedaan latar belakang pendidikan, keterampilan teknis, pengalaman, dan akses terhadap pelatihan atau pembaruan kompetensi yang diperlukan.

Reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu sangat bergantung pada penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Namun, masih terdapat kendala dalam hal penguasaan teknologi di kalangan pegawai. Beberapa pegawai kurang terampil dalam menggunakan aplikasi atau sistem informasi baru yang diterapkan dalam proses kerja. Hal ini mengakibatkan proses digitalisasi data dan pelayanan belum berjalan maksimal, serta menghambat transformasi menuju birokrasi yang modern dan berbasis teknologi.

Meskipun reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses kerja, kenyataannya masih banyak prosedur di BPS Kabupaten Indramayu yang tergolong kompleks dan memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dan prosedur administratif yang rumit sering kali menjadi penghambat utama dalam mencapai efisiensi kerja. Penyederhanaan proses birokrasi masih menjadi tantangan besar dalam upaya reformasi, terutama dalam hal perbaikan sistem perizinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan data.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit dan tingkat organisasi, baik di pusat maupun di daerah. Namun, kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antara unit seringkali menjadi

penghambat dalam implementasi reformasi. Komunikasi yang tidak efektif dan perbedaan prioritas antar unit menyebabkan beberapa kebijakan reformasi berjalan terpisah-pisah, sehingga mengurangi efektivitas program reformasi secara keseluruhan.

Budaya kerja lama yang masih mengakar di BPS Kabupaten Indramayu juga menjadi salah satu faktor penghambat reformasi birokrasi. Budaya kerja yang cenderung formalistik, kaku, dan berbasis hierarki menyulitkan adopsi budaya kerja baru yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Untuk itu, perubahan budaya kerja menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan strategi komunikasi yang baik, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan manajemen.

Secara keseluruhan, keberhasilan reformasi birokrasi di BPS tidak hanya tergantung pada upaya formal dalam perubahan struktur dan prosedur, tetapi juga membutuhkan transformasi mendalam pada aspek budaya kerja, kompetensi SDM, serta dukungan anggaran dan teknologi yang memadai. Mengatasi berbagai hambatan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, mulai dari pimpinan hingga pegawai di setiap unit kerja, untuk bersama-sama menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Upaya Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi pada BPS Kabupaten Indramayu

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik resmi untuk kepentingan nasional maka BPS Kabupaten Indramayu harus terus meningkatkan kualitas layanan publik, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan layanan berbasis digital, seperti portal data yang mudah diakses dan responsif, serta aplikasi pelayanan berbasis android maupun iOS yang tidak hanya user-friendly tetapi juga mampu menyajikan data yang komprehensif dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Pengembangan ini perlu diikuti dengan penyediaan panduan dan tutorial yang jelas bagi pengguna, sehingga layanan digital benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi digital.

2. Perbaikan Sistem Merit dalam Pengelolaan SDM di BPS Kabupaten Indramayu

Penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi yang lebih baik di lingkungan BPS. Sistem merit menekankan pada pengelolaan SDM yang berbasis pada kompetensi, kinerja, dan integritas, serta menjamin setiap pegawai mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengembangan karier. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sistem merit telah dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, namun pelaksanaannya kurang optimal. Karena masih terbentur peraturan tentang kepegawaian itu sendiri.

3. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

BPS Kabupaten Indramayu harus mengoptimalkan pengelolaan BMN agar lebih efektif dan efisien. Pengelolaan BMN yang baik akan mendukung operasional BPS Kabupaten Indramayu dengan lebih optimal, sehingga memberikan dampak positif pada nilai reformasi birokrasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring BMN, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan dan penggunaan BMN.

4. Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan Berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN di BPS Kabupaten Indramayu sangat penting untuk mendukung reformasi birokrasi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan (competency-based training) harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada penggunaan teknologi informasi, data analytics, dan kemampuan analitis lainnya yang

relevan dengan tugas BPS. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek soft skills seperti komunikasi, pelayanan publik, dan kepemimpinan.

5. Implementasi Sistem Pengawasan Internal yang Efektif

Untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana, BPS Kabupaten Indramayu perlu menguatkan sistem pengawasan internal. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit internal yang berkala dan pembentukan tim penjaminan mutu yang bertanggung jawab dalam memastikan setiap unit kerja mematuhi standar dan prosedur yang berlaku. Sistem pengawasan yang efektif akan meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

6. Peningkatan Tata Kelola Data dan Informasi

BPS Kabupaten Indramayu harus memastikan tata kelola data yang baik, dengan menerapkan prinsip keterbukaan data (open data) sesuai dengan standar nasional dan internasional. Penyediaan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPS Kabupaten Indramayu. Selain itu, tata kelola data yang baik akan mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data, yang merupakan salah satu indikator penting dalam reformasi birokrasi.

7. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi Informasi

Implementasi sistem manajemen kinerja yang transparan dan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas di BPS Kabupaten Indramayu. Sistem ini harus mencakup penilaian kinerja individu maupun unit kerja berdasarkan target dan indikator yang jelas, serta memungkinkan evaluasi secara real-time. Pengembangan dashboard kinerja yang dapat diakses oleh pimpinan dan pegawai akan mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

8. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal untuk Perbaikan Layanan

BPS Kabupaten Indramayu dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas layanan. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan teknologi, pelatihan pegawai, atau pertukaran informasi untuk memperbaiki proses bisnis di BPS Kabupaten Indramayu. Kolaborasi ini juga akan membuka peluang inovasi dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

9. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Nilai-Nilai BPS

Reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan sistem dan proses, tetapi juga perubahan budaya kerja. BPS Kabupaten Indramayu perlu menanamkan nilai-nilai organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik, kepada seluruh pegawai. Penguatan budaya kerja ini dapat dilakukan melalui kampanye internal, pelatihan, dan pembentukan role model dari kalangan pimpinan.

10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Upaya peningkatan reformasi birokrasi perlu diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang rutin dan menyeluruh. BPS harus memiliki mekanisme evaluasi yang jelas, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi ini harus didasarkan pada indikator-indikator yang objektif dan relevan dengan tujuan reformasi birokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi reformasi birokrasi yang diterapkan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu belum berjalan secara optimal meskipun beberapa langkah telah diambil, seperti pembaharuan mind set dan budaya kerja serta peningkatan sistem manajemen pemerintahan. Faktor-faktor pendukung, seperti komitmen pimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi, memainkan peran penting dalam keberhasilan reformasi ini. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan ketidakmerataan kualitas SDM masih menjadi penghambat

utama. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem penilaian kinerja, penguatan budaya kerja internal, serta peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan SDM agar reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Indramayu dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 205 Tahun 2023. Jakarta.
- Budiman, A. (2019). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2011). Mengelola Birokrasi Publik: Kajian dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan. Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Muluk, M. R. K. (2010). Reformasi Birokrasi: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslim, A., & Djalil. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta
- Nugroho, R. (2013). Publik Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno, Arief., dkk. (2019). Strategi Bersaing: Dalam Perspektif Militer dan Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Prayitno, Arief., dkk. (2024). Multi Peran Manajer: Mempersiapkan Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. (2018). Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2013). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS